

**PEMIKIRAN POLITIK SAYID ABUL A'LĀ MAUDUDI  
DAN KONTRIBUSINYA BAGI PAKISTAN**

**1941 - 1979**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Adab  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Humaniora, (S.Hum)

Disusun Oleh:  
Adiguna  
02121031

Di bawah Bimbingan :  
Sujadi, MA

**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Adab  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

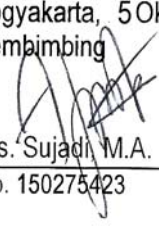
Nama : Adiguna  
NIM : 02121031  
Judul Skripsi : Pemikiran Politik Sayid Abul A'lā Maududi dan Kontribusinya Bagi Pakistan 1941-1979

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab Jurusan/Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam sidang Munaqasyah.

Dengan demikian mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Oktober 2007  
Pembimbing

  
Drs. Sujadi M.A.  
Nip. 150275423



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS ADAB**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513949

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/DA/PP.01.1/1170/2008

Skripsi dengan judul : Pemikiran Politik Sayid Abul A'la Maududi dan Kontribusinya bagi Pakistan 1941-1979

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Adiguna

NIM : 02121031

Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

#### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Maharsi, M.Hum.  
NIP.150299965

Penguji I

Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum.  
NIP. 150240122

Penguji II

Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum.  
NIP.150282645

Yogyakarta, 4 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN

Dr. H. Syahuddin Qalyubi, Lc., M.Ag.  
NIP. 150218625



## MOTTO

History is the witness of times, the torch of truth,  
The life of memory, the teacher of life, the messenger of antiquity  
Cicero

Time Present and time past Are both perhaps present in the future and  
time future contained in past  
T.S. Elliot, Collected Poems, 1992-1962, london: 1974

“Sesungguhnya Allah, tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum  
itu sendiri mengubah apa yang ada pada mereka”  
QS. al-Ra’du : 11

## PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua Orang Tuaku, dan keluargaku, yang senantiasa mendoakan saya.

Pemerintah Kabupaten Belitung, khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memberikan bantuan bea siswa, serta bapak Hamirudin Hamzah (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Belitung) dan anggota DPRD lainnya, yang telah memberi dukungan.

Teman-teman “Belitong” di Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

**PEMIKIRAN POLITIK SAYID ABUL A'LĀ MAUDUDI  
DAN KONTRIBUSINYA BAGI PAKISTAN  
1941-1979**

**Oleh Adiguna**

**ABSTRAKSI**

Sayid Abul A'lā Maududi salah satu tokoh penting dalam kebangkitan Islam, terutama dalam kelahiran negara Pakistan, setelah melepaskan diri dari India. Perjuangannya dimulai sejak tahun 1938, ketika Ia mulai aktif di dunia politik di situlah Maududi berperan dalam mengakomodasi kepentingan dan melindungi umat Islam di India. Selanjutnya, setelah berdirinya *Jama'at-e-Islāmi*, pada 26 Agustus 1941 di Lahore, Maududi berusaha mengimplementasikan pemikiran politiknya, khususnya dalam memperjuangkan daerah khusus bagi umat Islam, yaitu terciptanya Negara Islam. Maududi berusaha menciptakan sebuah tatanan negara yang didasarkan pada Syariat Islam. Ia menilai, bahwa umat Islam di India tidak dapat hidup berdampingan dengan umat Hindu, sebab kebudayaan Hindu dapat merusak ajaran-ajaran Islam dan dapat menyebabkan kemunduran.

Dalam penciptaan negara Islam, Maududi melalui *Jama'at-e-Islāmi* memperjuangkan pemberlakuan syari'at Islam sebagai konstitusi negara, Al Qur'an dan Hadits sebagai dasarnya. Maududi menggagas sebuah terma politik yang bernama Teodemokrasi yang dianggap lebih Islami dan menjadi ideologi yang ideal bagi Pakistan. Salah satu prinsip yang termuat didalamnya adalah *syurā* (musyawarah). Menurut Maududi antara negara Islam dan *syurā* tidak dapat dipisahkan, artinya, *syurā* mengarah kepada tatanan politik Islam dalam bernegara.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah penjelasan perjuangan politik Sayid Abul A'lā Maududi dalam mengimplementasikan konsep negara Islam. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik.

Fokus penelitian ini adalah pemikiran politik Maududi tentang teodemokrasi. Selain itu, aktivitas politik Maududi yang menjadi bentuk kontribusinya terhadap negara Islam Pakistan turut juga menjadi fokus penelitian ini.



## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ungkapan pertama dan utama yang penulis ungkapkan hanyalah *lafadz* puji syukur kepada Allah SWT. Karena hanya karena limpahan rahmat dan *inayah*Nya, keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemikiran Politik Sayyid Abul A’lā Maududi dan Kontribusinya Bagi Negara Islam Pakistan : 1941-1979”, dapat penulis raih. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sang kekasih Allah dan revolusioner sejati yang berkat cucuran keringat dan tetesan air mata, bahkan darah, telah menghadirkan agama paripurna ini, untuk kemaslahatan umat manusia.

Sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan semangat disertai kesungguhan dalam hati penulis, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan hadir dihadapan pembaca.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi, sangat tidak mungkin jika tanpa didukung berupa arahan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu kiranya sangat etis dalam Kata Pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga yang telah menyetujui judul skripsi yang telah penulis ajukan.
2. Ketua Jurusan SKI, bapak serta seluruh Dosen Jurusan SKI, Staf dan Karyawan Bagian Pengajaran serta Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
3. Bapak Sujadi, M.A. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Berbagai petunjuk, pengarahan, dan pengetahuan tentang skripsi yang telah diberikan, merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk dipergunakan bagi penulisan ilmiah selanjutnya.
4. Ayah dan Bunda yang telah meneteskan airmatanya di setiap doa pada sholatnya, serta pengorbanan materi demi keberhasilan ananda dalam meraih gelar sarjana. Kepada kakak perempuanku, Nurmalasari serta adikku Tri Lestari dan Riski Dwi Utami, yang banyak memberikan dorongan sehingga studi di UIN Sunan Kalijaga dapat diselesaikan.
5. Pemerintah Propinsi Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan berupa pemberian bea siswa,
6. Pemerintah Kabupaten Belitung khususnya, Bupati Belitung Bapak Ir. Darmansyah Husein, M.Si. dan Wakil Bupati Belitung, bapak Andi Saparudin Lana, SH yang telah memberikan bantuan bea siswa,
7. Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Bapak Hamirudin Hamzah (Ketua Komisi A) dan anggota DPRD lainnya, yang memberikan dukungannya,
8. Kepada Bapak Nazwar Chalidin Amar, yang senantiasa memberi dorongan, dalam kami menunaikan amanah kedua orang tua dalam kuliah di Yogyakarta,

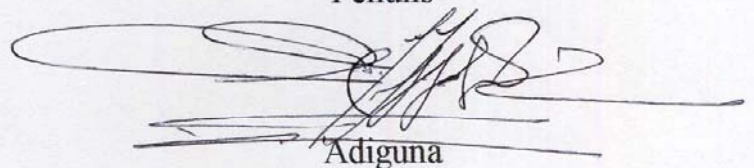


9. Habib Salim ald-Jufri dan Keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan dalam doa dan perbuatan,
10. Terima kasih juga untuk teman-teman *Agent of Change* di IKPB Cabang Yogyakarta, baik yang tergabung di Asrama Putra “Wisma Calamoa”, Asrama Putri “Tanjong Kelayang”, Ardian Halik, Rendi dan Hendriyanto di “Pundok Begalor” serta pihak lainnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Harapan penulis semoga skripsi ini mampu menjadi referensi dalam memberikan pengetahuan serta wawasan bagi semua pihak, khususnya mereka yang berada di lingkungan akademis. Berbagai kekurangan dalam penulisan kami, semoga dapat diperbaiki dalam karya lain dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007

Penulis



Adiguna

## DAFTAR ISI

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>       | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>               | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>          | <b>v</b>   |
| <b>ABTRAKSI.....</b>             | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>       | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>           | <b>x</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1  |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 11 |
| D. Tinjauan Pustaka .....                | 12 |
| E. Kerangka Teori .....                  | 18 |
| F. Metode Penelitian .....               | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan .....          | 24 |

### **BAB II RIWAYAT HIDUP MAUDUDI**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Keluarga.....       | 27 |
| B. Latar Belakang Pendidikan.....     | 29 |
| C. Latar Belakang Organisasi .....    | 39 |
| D. Latar Belakang Sosial Budaya ..... | 54 |

### **BAB III PEMIKIRAN POLITIK MAUDUDI**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| A. Tentang Demokrasi ..... | 69 |
|----------------------------|----|

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| B. Kedaulatan Tuhan di Dalam Teodemokrasi..... | 79  |
| 1. <i>Khilāfah</i> .....                       | 81  |
| 2. <i>Al-Hakīmiyah Al-Ilāhiah</i> .....        | 88  |
| 3. Trias Politika .....                        | 93  |
| a. Lembaga Legislatif.....                     | 96  |
| b. Lembaga Eksekutif.....                      | 110 |
| c. Lembaga Yudikatif.....                      | 116 |
| 4. Tujuan Negara.....                          | 119 |

#### **BAB IV KONTRIBUSI PEMIKIRAN POLITIK MAUDUDI BAGI PAKISTAN**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Peranan Maududi di dalam <i>Jama'āt-e Islāmi</i> .....                                  | 123 |
| 1 Manifestasi Pemikiran Politik Maududi di dalam Ideologi<br><i>Jema'āt-e-Islāmi</i> ..... | 125 |
| 2. Peranan Maududi di dalam Politik <i>Jema'āt-e Islāmi</i> .....                          | 131 |
| B. Kontribusi Terhadap Konstitusi Pakistan .....                                           | 135 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 147 |
| B. Saran-saran..... | 150 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 151 |
|-----------------------------|-----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat India terdapat keragaman agama, yang sebagian besarnya menganut agama Hindu. Jumlah mayoritas pemeluk agama ini, dalam menjalankan ajaran politeistik ini, berpengaruh pada terciptanya kehidupan sosial dan kultural India kental dengan ajaran Hindu. Artinya, kebudayaan masyarakat sebagian besarnya adalah manifestasi ajaran-ajaran Hindu. Kondisi mayoritas ini menimbulkan sejumlah efek yang sangat signifikan dalam korelasinya terhadap penganut agama lain. Mulai dari dominasi sosial budaya hingga politik pemerintahan, menjadi dampak yang kian mewarnai dari arti mayoritas yang berujung pada superioritas. Dampak tersebut sangat dirasakan oleh umat Islam, yang dianut dalam jumlah kecil masyarakat India. Besarnya dominasi penganut Hindu, mengakibatkan masyarakat muslim sulit untuk mengaktualisasikan diri mereka. Kebudayaan Hinduisme yang dominan, membendung Muslim untuk menerapkan keyakinannya dalam kehidupan. Meskipun mereka telah menjadi bagian dalam tatanan sosial masyarakat India sejak lama, akan tetapi dominansi yang besar kelompok Hindu mengakibatkan eksistensi mereka terasa sulit. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penguatan agama sebagai ideologi kebangkitan Muslim di India, dengan nama “nasionalisme religius”, yang bertujuan lahirnya tanah air yang merdeka.

Keinginan terbentuknya sebuah tanah air yang terpisah bagi Muslim di India untuk kali pertama disampaikan Muhammad Iqbal—seorang Muslim modernis, hasil didikan Barat—yang tergabung dalam Liga Muslim,<sup>1</sup> pada Mukhtar Liga Muslim pada tahun 1930. Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menyampaikan perlunya negara Islam, yang dikenal dengan Resolusi Lahore.<sup>2</sup> Menurutnya antara muslim dan penganut Hindu tidak mungkin dapat hidup secara berdampingan dalam suatu bangsa. Perbedaan ajaran agama yang dianut kemudian membentuk pola sosial budaya yang berbeda di antara keduanya adalah sangat signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk hidup menyatu.<sup>3</sup>

Dalam perdebatan lahirnya tanah air merdeka bagi Muslim di India, Sayid Abul A'la Maududi, yang dikenal sebagai tokoh fundamentalis Islam, lahir pada tanggal 25 September 1903 M. (3 Rajab 1321 H) di Aurangabad India selatan,<sup>4</sup> mengemukakan pandangannya. Meskipun awalnya sosok yang nasionalis, pro persatuan India, namun akhirnya perubahan ke arah fundamentalis *Islām* dialaminya. Sejak itulah pandangannya kian religius, selalu mengemukakan sisi eksotis Islam dan anti terhadap Barat.

Maududi juga menginginkan lahirnya tanah air bagi muslim, akan tetapi pengertian tanah air Islam menurutnya bukan hanya dalam artian berpenduduk mayoritas Muslim, akan tetapi dalam politik pemerintahannya harus berpijak pada

---

<sup>1</sup> John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, pen. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 284.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>3</sup> Siti Maryam, (ed), *Sejarah dan Peradaban Islam : Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Cet. Kedua, (Yogyakarta : LESFI, 2004 ), hlm. 191.

<sup>4</sup> “Maulana Sayyid Abul A'la Maududi” dalam situs <[www.witness-pioneer.org](http://www.witness-pioneer.org)> diakses pada 1 Desember 2006

ajaran Islam yang bersumber pada al Qur'an dan as Sunnah. Semuanya serba Islam, begitulah kiranya untuk tanah air yang Maududi idamkan.

Ideologi lainnya seperti yang bersumber dari Barat baginya tidak bisa dijadikan dalam pemerintahan Islam. Bahkan Maududi mengkritik Barat, yang dianggapnya benar-benar ateistik dan materialistik, seperti pandangan Barat mengenai fenomena alam, bahwa tidak ada sesuatupun di dunia, yang tidak terjangkau oleh indera. Hal ini menurut Maududi, sebagai penyebab Barat bersikap ateistik, tidak sadar akan adanya maha pencipta dan penguasa. Peradaban Barat tak lebih dari kebobrokan, berbagai kesalahan tiada hentinya berhembus dari akar peradaban yang bobrok, menyebabkan kehidupan menjadi neraka bagi orang-orang bobrok.<sup>5</sup>

Dalam kebencian Maududi terhadap Barat bukan berarti Ia menyalahkan Barat sepenuhnya, terutama kaitannya dalam kemunduran dunia Islam dan kesulitan lain yang melanda dunia Islam. Ia memandang hal ini disebabkan oleh mudurnya ajaran Islam pada tataran praktisnya di tengah kaum Muslimin. Dengan demikian yang juga patut disalahkan adalah Muslim bukanlah Barat semata :

“Peradaban Barat bukanlah tandingan bagi Islam, bahkan andaikata saja harus terjadi konflik dengan Islam, maka tidak mungkin ada peradaban lainnya yang mampu mengalahkan Islam. Tetapi tragedinya adalah bahwa Islam yang sekarang terlibat konflik dengan peradaban Barat hanyalah bayang-bayang Islam yang sesungguhnya. Umat Islam sama sekali tidak memiliki karakter, moral, ide dan ideologi Islam, dan telah kehilangan semangat keIslaman. Semangat Islam yang sesungguhnya tidaklah di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah mereka, juga tidak dalam kehidupan pribadi mereka, maupun urusan-urusan publik. Kehidupan

---

<sup>5</sup> William Wontgomerry Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, pen. Noor Hadi, (Yogyakarta: Hafamira, 1996), hlm.66



praktis mereka seluruhnya tidak ada hubungannya dengan Islam. Hukum Islam sekarang tidak mengatur perilaku individu ataupun perilaku kolektif mereka”.<sup>6</sup>

Seperti *Ikhwānul Muslimīn* di Mesir, Maududi menyalahkan ulama khususnya atas terjadinya “Revolusi Kritis” yang sedang dilewati dunia Islam.

“Banyak kesalahan yang terjadi karena situasi yang berbahaya ini harus diawali dengan revolusi, untuk bertindak dan mencoba memahami prinsip-prinsip dan bidang-bidang esensial dari peradaban Barat yang baru, dan pergi ke negara-negara Barat untuk mengkaji dasar-dasar intelektual dan keilmuan, yang merupakan bangunan besar peradaban muncul. Dengan bantuan ijtihad, mereka harus berjuang mengajak umat Islam untuk menerima dan menggunakan pengetahuan praktis, serta temuan-temuan ilmiah yang memungkinkan bangsa-bangsa Barat meraih kemajuan yang luar biasa. Mereka harus berusaha membawa instrumen-instrumen kemajuan yang baru, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, ke dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial umat Islam”.<sup>7</sup>

Dua kalimat terakhir dalam kutipan di atas, mengesankan bahwa Maududi bukan seorang yang tidak setuju dengan berbagai pembaharuan yang akan membawa penerapan syari’ah secara lebih memuaskan dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi masa kini. Dengan telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di alam temporal ini, berupa hilangnya supremasi Muslim di sebagian besar belahan dunia, perlu disikapi dengan reinterpretasi syari’ah sesuai dengan kebutuhannya dalam kondisi yang berubah.

Penolakan Maududi terhadap ideologi Barat dan kemudian mengembangkan gagasan yang berorientasi wahyu Allah salah satunya bertujuan untuk menegaskan keunggulan ajaran Islam, sehingga ideologi pemimpin muslim yang berintelektual Barat digantikan oleh ajaran Islam.<sup>8</sup> Seperti demokrasi yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.67

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.68.

<sup>8</sup> Hasan at-Turabi, “Kebangkitan Islam dan Negara-Negara Kawasan Arab”, (1999), dalam situs <www.Isnet.com> diakses pada 1 Desember 2006.

dipandang sebagai sistem politik yang ideal dan berlaku dimanapun dan kapanpun. Baginya, setiap muslim tidak layak untuk menganut paham tersebut, bahkan ia mengkafirkan Muslim yang mengadopsi demokrasi.<sup>9</sup> Baginya ideologi Barat bukan hanya bertentangan dengan pandangan Islam, akan tetapi sangat mengancam kepentingan muslim. Padahal Islam adalah agama paripurna mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, seperti kekuatan sosio-politik yang dimiliki Islam sangat unggul dan efektif untuk menggantikan ideologi barat seperti sosialisme, dan kapitalisme.<sup>10</sup>

Pandangan Maududi kian religius, Ia memandang wahyu Tuhan tidak mungkin dapat ditandingi oleh pemikiran manusia, sehingga tidak ada alasan bagi muslim untuk mengadopsi ideologi Barat, yang tak lebih hasil intepretasi manusia. Wahyu Tuhan versus ideologi manusia kiranya inti dari pandangan Maududi dan ideologi Barat. Meskipun demikian dibalik kritikan yang tajam terhadap ideologi Barat, Maududi masih menggunakan ragam istilah yang identik dengan Barat, seperti revolusi Islam, Negara Islam dan Ideologi Islam.

Revolusi Islam dalam pemikiran Maududi, merupakan pergulatan antara Islam dan kekufuran. Sebuah perubahan yang bertujuan untuk meletakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, seiring menghapus pengaruh ideologi dan hal-hal lain diluar Islam yang merusak ajaran-ajaran Islam. Tercapainya revolusi ini pada gilirannya akan memprakarsai perubahan besar-besaran dalam

---

<sup>9</sup> "Sayed Abul A'la Maududi", (2006), dalam situs <[www.icna.org](http://www.icna.org)> diakses pada 1 Desember 2006.

<sup>10</sup> *Ibid*

masyarakat,<sup>11</sup> puncak kesuksesannya adalah terbentuknya sebuah negara Islam yang menjadikan akidah Islam menjadi dasar undang-undangnya. Sebab bagi Maududi hanya dengan ajaran Islam yang memiliki ketahanan politik dan hukum bagi manusia, baik secara individu (*ijtihād fardī*) maupun kelompok (*ijtihād jama'i*), seperti disebutkan surat Yusuf ayat 40.<sup>12</sup>

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ  
 إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Negara Islam yang dimaksud Maududi dijalankan dengan sistem pemerintahan yang mengakui sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Maududi mengemukakan sebuah terma politik baru, dianggap lebih memiliki karakter Islam dan mampu menjamin kemaslahatn manusia, yaitu Teodemokrasi.<sup>13</sup> Jika diuraikan dalam makna etimologis didalamnya terdiri dari dua kata, Teo dan Demokrasi. Akan tetapi, dalam tataran praktisnya, “Teo” yang dimaksud bukan mengarah pada teokrasi, seperti yang pernah dipraktekkan oleh ahli pendeta

<sup>11</sup> Deny Suito, “Akar Historis Negara Islam”, (2006) dalam situs <www.cmm.or.id.> diakses pada 1 Desember 2006

<sup>12</sup> Abul A'la al Maududi, *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam*, pen. Moh. Nurkaim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 35

<sup>13</sup> M.A. Karandikar, *Islam in India's Transition To Modernity*, (Delhi : Orient Longmas, 1968), hlm.227

kristiani di Eropa pada abad pertengahan. Demokrasi, bukan pula dimaknai sebagai pemerintahan yang kekuasaannya berada ditangan rakyat. Akan tetapi demokrasi dalam sistem ini adalah keterbatasan manusia dalam menikmati hak-haknya dibawah otoritas Tuhan melalui ketentuan-ketentuannya. Sistem ini memiliki warna tersendiri dari ragam sistem politik yang telah ada sebelumnya, inti darinya adalah pengakuan atas kedaulatan Tuhan, yaitu segenap wahyu *Ilāhi* menjadi sumber konstitusi negara, kekuasaan manusia berada dalam batas-batas kedaulatan Tuhan.

Bentuk pemerintahan ini mencerminkan relasi agama dan politik, tiada pemisahan antara satu dengan lainnya, ajaran Islam menjelma sebagai dasar pijakan warga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keterkaitan ini, diwujudkan dengan karakteristik perundang-perundangan dalam suatu negara Islam. *Pertama*, baik individu, keluarga, golongan partai maupun seluruh warga negara tidak mempunyai hak otoritas hakim. Hakim yang sebenarnya adalah Allah. Dialah Tuhan penguasa tertinggi dalam artian yang sebenarnya. Adapun unsur selain Allah berkedudukan sebagai rakyat biasa dalam kerajaan-Nya yang besar. *Kedua*, individu selain Allah tidak mempunyai otoritas hukum, meskipun dia orang Islam yang mempunyai kelebihan di antara orang lain. Dia tidak berhak merubah Undang-undang yang ditetapkan Allah. *Ketiga*, Negara Islam tidak diperbolehkan mencetuskan hukum maupun undang-undang. Dia harus mematuhi undang-undang dari Rabbnya yang dibawa nabi, sekalipun situasi dan kondisi telah mengalami perubahan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 37-38

Bentuk pemerintahan Islam adalah bentuk yang ideal karena sangat demokratis menurut Maududi. Seperti yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah S.A.W. sampai pada para sahabatnya, yaitu Abu Bakar as Shiddiq, Umar Ibn al Khattab, Utsman Ibn Affan dan ‘Ali Ibn Abī Thalib yang dikenal dengan *alKhulafā’ ar-Rāsyidūn*.<sup>15</sup>

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam teodemokrasi adalah *syurā* atau musyawarah, yang menjadi dasar kelima dari konsep negara Islam-nya (selain kekuasaan perundang-undangan Ilahi, keadilan, persamaan, tanggung jawab pemerintah) dan menjadi keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya menjalankannya. Maududi mendasarkan hal ini, pada al Qur’an surat *asy Syurā* ayat 38 dan surat *al ‘Imran* ayat 159. Demikian juga Maududi berlandaskan kepada as Sunnah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu, dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja “.

Selain al Qur’an dan al Hadits, Maududi berpegangan juga kepada perkataan Umar Ibn Khattab r.a. yaitu :

“Barang siapa yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal bagi kamu sekalian melainkan membunuhnya, dan tidak ada khalifah kecuali berdasarkan musyawarah.”<sup>16</sup>

Maududi memandang *syurā* bukan hanya berarti sebagai proses bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Rasulullah S.A.W dan *al Khulafā’ al*

<sup>15</sup> Sofwan Jannah, “Konsep Syura dalam Islam dan Pemerintahan Demokrasi Menurut UUD 1945 (Studi Perbandingan)”, dalam *Jurnal Hukum Islam al Mawarid*, Edisi 6, (Yogyakarta : Fak. Syariah UII, Desember 1997), hlm.60

<sup>16</sup> Abul A’la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Dasar Sejarah Pemerintahan Islam*, pen. Muhammad al Baqir (Bandung: Mizan, cet.4, 1993), hlm.99

*Rāsyidūn* telah mempraktekkan *syurā* bahkan telah melembagakannya menjadi *Ahl al Hall wa al 'Aqd*, yang pada prinsipnya menyerupai lembaga legislatif.<sup>17</sup> Dari sinilah *Syurā* dipandang dalam bentuknya yang menyeluruh, baik di bidang fiqh maupun pemerintahan.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan visi ideologis politiknya Maududi mendirikan *Jama'at e Islāmi* pada tanggal 26 Agustus 1941 di Lahore. Partai ini merupakan salah satu gerakan religio-politik Islam tertua dari jenisnya, yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kebangkitan Islam di dunia Muslim pada umumnya dan di Asia Selatan pada khususnya.<sup>19</sup>

Sejak berdirinya, *Jama'at-e-Islāmi* mengikuti ajaran dan pandangan Maududi. Partai ini berjanji akan menciptakan tatanan yang didambakan di alam temporal ini dan mendorong kaum Muslim untuk memulai revolusi Islam, membentuk masyarakat dan politik yang sesuai dengan ajaran agama seperti yang diinterpretasikan Maududi. Tujuan jangka pendek partai ini adalah menjaga kepentingan Islam di arena politik dan mengupayakan agar kekuatan sekuler tidak melakukan konsolidasi kekuasaan.<sup>20</sup>

Selain fakta atau bukti tersebut masih banyak fakta lain yang mungkin akan dikemukakan dalam pembahasan skripsi ini. Fakta sejarah tersebut merupakan bukti yang berbicara lebih bermakna dari berbagai bentuk alasan lain.

---

<sup>17</sup> Achmad Jainuri, "Pemikiran al-Maududi tentang Negara Islam", dalam *Islam Berbagai Perspektif Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. DR. H. Munawwir Sjadzali, MA*, (Yogyakarta: LPMI, Cet. 1, 1995), hlm.192-193.

<sup>18</sup> Taufiq Muhammad Asy-Syawir, *Syura Bukan Demokrasi*, pen. Djamaludin (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 1997), hlm.36.

<sup>19</sup> Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, hlm.116. lihat juga di *Ensiklopedia Gerakan Keagamaan*, dalam situs <www.al\_ahkam.net> diakses pada 1 Desember 2006

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.



Dalam lembaran sejarah kebangkitan Islam khususnya di India perjuangan Sayid Abul A'lā Maududi tercatat sebagai tokoh pemikir yang berpengaruh. Kemampuan pemikirannya dalam mengungkap dimensi eksoteris Islam, melalui kajian yang mendalam terhadap wahyu Tuhan dan sunnah Nabi Muhammad S.A.W., mengenai keagungan dan keunggulan ajaran Islam yang salah satunya mengenai politik pemerintahan, menuntun Maududi pada pemahaman bahwasanya Tuhan-lah pemilik kedaulatan sesungguhnya dalam sistem pemerintahan sehingga orientasi penyelenggaraan negara adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Sistem pemerintahan yang digagas oleh Maududi ini, kemudian diperjuangkan olehnya dan juga seiring dengan pergerakan *Jama'at-e-Islāmi* pemikirannya ini mampu menjadi kontribusi penting bagi terciptanya Pakistan yang ditunjukkan dengan konstitusinya yang berlandaskan Islam pada tahun 1973.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah figur Sayid Abul A'lā Maududi, yaitu mengenai pemikiran politiknya mengenai teodemokrasi yang merupakan sistem politik pemerintahan negara Islam dan perjuangannya dalam mewujudkannya melalui partai *Jama'at-e-Islāmi*. Dalam penelitian ini akan tampak kontribusi pemikiran politik Maududi dalam proses lahirnya sebuah tanah air yang merdeka bagi Muslim di India, dengan nama Republik Islam Pakistan. Penelitian ini dimulai pada tahun 1941, yang ditandai dengan berdirinya *Jama'at-e-Islāmi*. Tahun ini merupakan titik tolak perjuangan Maududi secara melembaga untuk pemikirannya mencapai tataran praktisnya. Hal

ini menimbulkan daya tarik bagi penulis dan menjadikannya sebagai tahun awal dalam penyusunan skripsi ini. Dalam perjalanan kehidupannya, sebagai tokoh besar pembaharuan Islam, berbagai jasa telah Ia berikan. Mempelajari biografi Maududi tentunya akan terasa lengkap, jika penelitian ini sampai tahun 1979, yaitu saat Maududi meninggal dunia. Untuk pelacakan atas peristiwa-peristiwa dan penjabaran permasalahan tersebut, akan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Siapakah Sayid Abul A'lā Maududi ?
2. Apa konsep negara Islam menurut Sayid Abul A'lā Maududi ?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran politik Maududi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan serta target yang ingin dicapai, maka sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengungkap dan mendapatkan gambaran secara jelas tentang biografi Sayid Abul A'lā Maududi.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran politik Sayid Abul A'lā Maududi.
3. Untuk mengetahui pemikiran politik Sayid Abul A'lā Maududi.
4. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Sayid Abul A'lā Maududi dalam mengimplementasikan pemikiran politiknya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kepustakaan yang berhubungan dengan pemikiran politik tokoh-tokoh Islam khususnya mengenai tokoh Sayid Abul A'lā Maududi,
2. Kajian terhadap pemikiran politik Maududi ini akan menjadi kajian yang bermanfaat terhadap sistem politik Islam. Posisi Islam dalam realitas politik, merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Sayid Abul A'lā Maududi dalam kapasitasnya sebagai tokoh pemikir Islam dan juga aktivis politik telah mampu memposisikan ajaran-ajaran Islam pada sistem politik pemerintahan. Oleh karena itu, kajian ini juga sangat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan mengenai konsep kedaulatan Tuhan dalam pemerintahan Islam. Selain itu, dapat juga menjadi solusi alternatif pada sistem politik pemerintahan, dalam melindungi dan mengakomodasi kepentingan umat Islam.
3. Memberi kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kualitas di bidang pemikiran Islam dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai Pemikiran Politik Sayid Abul A'lā Maududi mengenai negara Islam dan *Syurā* sudah banyak diangkat, dalam beberapa buku. Akan tetapi, kajian tersebut belum memberikan informasi sejarah yang komprehensif mengenai latar belakang kehidupan Maududi, baik keluarga, sosial budaya, pendidikan dan organisasi yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian

Maududi, khususnya dalam kaitan terhadap timbulnya pemikiran politik. Selain itu kajian mengenai pemikiran Maududi mengenai teodemokrasi dan perbedaannya dengan demokrasi sangat terbatas, dengan demikian penulis berusaha mempelajari dan menganalisis lebih mendalam mengenai Maududi dengan demikian akan didapat karya ilmiah yang lebih komprehensif mengenai Maududi.

Untuk mendukung penulisan skripsi ini terdapat beberapa karya yang pembahasannya dapat menunjang topik ini di antaranya: karya Ali Rahnema (ed) berjudul *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1995). Buku ini membahas beberapa tokoh pembaharuan Islam, seperti Sayid Ruhullah ‘Ali Khomeini dan Baqir as Sadr. Di dalam buku ini juga terdapat pembahasan mengenai Maududi berupa latar belakang keluarga, pendidikan dan aktivitas politiknya, yang dijabarkan oleh penulis sebagai latar belakang terhadap lahirnya pemikiran politik Maududi. Lebih lanjut dalam karya ini turut dibahas keterkaitan Maududi dengan *Jama’at-e-Islāmi*, baik aktivitas maupun peranannya. Keterkaitan ini amat erat hubungannya, terutama dalam hal pergerakan *Jama’at* dalam mengimpelementasikan pemikiran Maududi dalam penciptaan Pakistan sebagai negara Islam. Sekilas, karya ini mampu memberikan informasi sejarah yang memadai mengenai Maududi dan tidak jauh bedanya dengan skripsi ini. Akan tetapi dalam perbandingannya, antara karya ini dengan skripsi ini, terletak pada sikap Maududi yang antipati terhadap ideologi Barat, yaitu mengenai demokrasi. Padahal memahami sikap kontradiktif Maududi terhadap Barat,

sangat signifikan dalam memahami pemikiran politik Maududi, namun sayangnya Ali Rahnama hanya sekelumit membahasnya.

Dalam sebuah karya yang berjudul *Islam India's Transition to Modernity*, yang ditulis oleh M.A. Karandikar, (Delhi : Orient Longmas, 1968.) dibahas situasi Muslim India yang berhadapan dengan berbagai persoalan baik sosial yang berhadapan dengan Inggris, maupun kultural yang bergesekan dengan penganut Hindu. Dalam karya ini diuraikan biografi berbagai tokoh Muslim di India lengkap dengan pemikirannya, dalam menyikapi perubahan sosial sebagai akibat pengaruh Barat semasa Inggris berkuasa dan juga pemisahan India dan Pakistan. Maududi diterangkan dalam posisinya yang berada di tengah-tengah kelompok Muslim adaptasionis Barat, membawa sebuah ideologi pengangungan terhadap Islam dan menolak ideologi Barat. Karya ini, menampilkan sosok Maududi dengan pemikirannya yang religius, sayangnya karya ini tidak menerangkan latar belakang keluarganya, yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadiannya.

William Montgomery Watt, dengan karyanya berjudul *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, (Yogyakarta: Hafamira, 1996.) menguraikan secara singkat biografi Maududi, baik latar belakang kehidupan maupun pemikirannya. Watt hanya menampilkan Maududi sebagai figur Islam yang antipati dengan Barat dan kritiknya terhadap sikap Muslimin yang mengkultuskan Barat. Dalam kaitannya dengan skripsi ini, karya Watt ini tidak dapat memberikan informasi mengenai konsep Maududi kedaulatan Tuhan dalam pemerintahan Islam, yaitu Teodemokrasi dan aktivitas politiknya hanya sedikit disinggung.

Azyumardi Azra dalam *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), pembahasan mengenai buku ini difokuskan pada masalah konsep jihad dan revolusi Islam Maududi. Karya ini berguna untuk mengetahui perjuangan Maududi dalam mengimplementasikan pemikirannya, sebab menurut Maududi antara revolusi Islam dan negara Islam mempunyai hubungan yang erat, negara Islam merupakan puncak revolusi Islam.

Dalam buku yang berjudul *The Making of Pakistan* yang ditulis oleh Richard Symonas, yang kemudian diterjemahkan dengan judul *Pembinaan Pakistan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1951). Dalam buku ini dijelaskan tentang proses terbentuknya negara Pakistan yang diawali dengan adanya komunitas muslim dalam negara kesatuan India yang tidak dapat merasakan bahwa hak-hak mereka (baik agama maupun politik) akan terjamin dalam negara tersebut dan dijelaskan juga tentang masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat sebagai akibat dari pemisahan tersebut, baik masalah politik, sosial maupun ekonomi. Mengenai tokoh-tokoh yang terlibat perjalanan kemerdekaan India dijelaskan secara global dan menyeluruh. Karya ini kurang mampu mengarahkan secara jelas pemikiran tokoh-tokoh India, khususnya Maududi.

H. A. Mukti Ali dalam *Alam Pikiran Islam Modern di India dan di Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), mengulas mengenai pemikiran para tokoh muslim India dan Pakistan dalam periode pergolakan dalam kurun waktu satu abad. Karya tersebut cukup mampu menjelaskan dalam peranan dari para tokoh India dan Pakistan. Mengenai Maududi, buku ini membahas mengenai riwayat

hidup dan pandangannya tentang Islam serta kebangkitan, revolusi dan reformasi. Itupun sangat luas, bahkan di dalamnya tidak membahas konsep *Syurā* Maududi secara mendetil.

Pemikiran politik Maududi diuraikan oleh Munawir Sjadzali, dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993). Buku ini berisi tentang sejarah ketatanegaraan dalam Islam, sejak periode Rasulullah, *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*, hingga kontemporer. Pada larya ini juga dibahas mengenai pandangan politik dalam kelompok-kelompok Islam, yaitu Syi'ah, Khawarij dan Murji'ah. Maududi dalam karya ini ditempatkan oleh penulis sebagai tokoh pemikir politik Islam pada era kontemporer. Buku ini hanya menjelaskan pemikiran politik Maududi, meskipun hanya diuraikan secara garis besar. Buku ini belum mampu menjadi karya yang memadai dalam memberikan informasi mengenai biografi Maududi, berupa latar belakang keluarga, pendidikan, serta organisasi.

Sarbini, dengan karyanya yang berjudul *Islam di Tepian Revolusi*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2004) menjabarkan mengenai ide dan ideologi revolusi, akar-akar revolusi dan praktek revolusi di dalam dunia Islam. Pada buku ini Maududi dibahas pada bab II Revolusi dan Pembebasan, Maududi disejajarkan dengan Ali Syari'ati dan Farid Esack. Dalam menerangkan Maududi karya ini tidak jauh berbeda dengan karya Ali Rahnema di atas. Tidak banyak informasi mengenai Maududi yang didapat dari karya ini. Sarbini membahas Maududi hanya sebatas pemikirannya tentang negara Islam, itupun hanya sedikit saja.



Abul A'la Al Maududi, dalam karyanya *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Dasar Sejarah pemerintahan Islam*, penerjemah Muhammad al Baqir. cet.4. (Bandung: Mizan. 1993), menjabarkan tentang konsep pemerintahan menurut Islam. Di dalam karya tersebut Maududi mempertentangkan antara kerajaan dan khilafah, Ia menguraikan berbagai kekurangan yang terdapat dalam sistem monarki. Menurut Maududi bentuk pemerintahan yang ideal adalah yang diajarkan Islam yaitu *khilāfah*, bukan kerajaan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan keempat khalifah penggantinya. Maududi menguraikan kedudukan Tuhan dalam sistem pemerintahan Islam. Selain kedudukan Tuhan dan *khilāfah*, Maududi juga menegaskan kriteria orang-orang yang dipandang layak untuk menjadi pemimpin. Di dalam buku ini pada bab pendahuluan, Amien Rais menerangkan biografi singkat diri Maududi. Karya ini mampu memberikan informasi mengenai biografi, sistem kerajaan dan *khilāfah*. Namun, Maududi tidak menguraikan pandangannya tentang demokrasi, sehingga penulis untuk mendapatkan pandangan Maududi tentang hal ini harus mendapatkannya dari karya lain.

Dari hasil analisis berbagai referensi yang ada di atas menunjukkan beragam sisi lemah, padahal, sebagai tokoh besar Islam, sudah selayaknya ada uraian yang lebih lengkap mengenai Maududi, sebagai wahana memperluas khasanah pengetahuan mengenai tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Untuk itu, penulis berusaha menciptakan sebuah karya yang lebih memadai, analitis dan interpretatif dari karya-karya menyangkut biografi Maududi, yang telah ada sebelumnya.

### E. Kerangka Teori

Ajaran Islam sebagai agama paripurna menunjukkan kesempurnaan ajarannya yang mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Islam bukan hanya ajaran mengatur hubungan dengan Tuhan (*hablun min Allāh*), melainkan juga mengatur pola hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam bermasyarakat (*hablun min-nās*), telah berpengaruh dan memberikan dorongan yang sangat besar untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan masyarakat dan menjadi landasan normatif bagi perjuangan membumikan ajaran Islam.

Salah satu bidang kemasyarakatan tersebut adalah dunia politik yang pada akhirnya bermuara pada model suatu negara. Kecenderungan terhadap timbulnya tindak lanjut keinginan kebutuhan manusia yang beranekaragam yang tidak dapat terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan kemampuan diri sendiri merupakan pemicu timbulnya suatu negara.<sup>21</sup> Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*dīn wa daulah*). Islam merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dengan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara betul-betul organik dimana negara berdasarkan *syari'ah* Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam tipologi ini, Islam bukanlah sekedar agama dalam pengertian Barat yang

---

<sup>21</sup> J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: CV. Rajawali, cet.2, 1991), hlm.62.

sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.<sup>22</sup>

Negara Islam (*al dawlah Islāmiyyah* atau *al Hukumah al Islāmiyyah*) tidak disebutkan di dalam al Qur'an. Istilah ini merupakan satu istilah baru yang awalnya diperkenalkan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Caliphate and the Great Immate*. Meskipun demikian di dalam al Qur'an terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan hal ini, seperti hal ini, seperti *khalīfah*, *khulafā* atau *khalā'if* dan juga istilah *imam*.<sup>23</sup> Kelahiran negara Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah dalam *al Siyasah asy Syar'iyah* merupakan suatu hal yang amat penting. Organisasi politik bagi persoalan kehidupan sosial manusia merupakan keperluan negara yang terpenting, tanpa adanya negara, agama tidak akan tegak kokoh, karena Allah mewajibkan manusia berbuat *amar ma'ruf nahi munkar* dan menolong pihak yang teraniaya, maka semua yang diwajibkan tentang *jihād*, menegakkan keadilan, dan menegakkan *hudud*, tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Prinsip dasar kekuasaan (negara) dalam konsepsi Islam harus ditegakkan atas dasar konstitusi yaitu *al Qurān*, *as Sunnah*, *ijma'* dan *Qiyas*. Dalam pelaksanaannya, konstitusi Islam adalah penjabaran atau tafsir dari konstitusi tersebut yang dalam prakteknya setiap negara boleh berbeda, guna menjamin berbagai kepentingan bangsa. Hal yang paling penting dalam menegakkan konstitusi Islam terletak pada kepatuhan dari umatnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyyah, "Maka menegakkan *dawlah Islāmiyyah*

---

<sup>22</sup> Sukron Kamil, *Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer* dalam Jurnal Universitas Paramadina Vol.3 No. 1, September 2003: 63-76

<sup>23</sup> Abd. Halim El Muhammady, "Konsep Negara Islam" dalam situs <[www.nislam.com](http://www.nislam.com)> diakses pada 19 Juli 2007

merupakan merupakan perkara yang wajib untuk melaksanakan hukum-hukum syari'at". Konsepsi itu telah menjadi rujukan bagi penulis-penulis muslim klasik maupun modern, yang pada umumnya berada dalam wacana pentingnya hubungan antara agama dan negara (kekuasaan).<sup>24</sup>

Ibnu Khaldun mengkhususkan negara dengan menggunakan kata "*dawlah*", yang mengandung pengertian bahwa setiap pemegang kekuasaan atau kepemimpinan politik dalam suatu wilayah termasuk kedaulatan raja dalam pemerintahannya harus didasarkan pada kekuasaan *syari'at* sebagai pemegang kekuasaan.<sup>25</sup>

Dalam mewujudkan negara, dalam arus pemikiran Islam terdapat pemikiran yang legal-formal maupun etis-kontekstual. Dalam prakteknya, yang legal-formal menjadikan syariah sebagai satu-satunya sumber kekuasaan negara. Sedangkan yang etis-kontekstual mengacu pada nilai-nilai apapun sepanjang mengandung makna keadilan dan persaudaraan sebagai ukuran berlakunya nilai-nilai Islam di sebuah negara. Dalam kaitannya dengan pemikiran politik Sayid Abul A'lā Maududi, sebagai tokoh yang memperjuangkan terbentuknya negara Islam yang legal formal Maududi menjadikan al Quran dan as Sunnah sebagai dasar dalam sebuah sistem politik pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dengan penelitian sejarah ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah penjelasan

---

<sup>24</sup>"Konsepsi Negara dalam Sejarah Pemikir Islam", 25 September 1999, dalam situs <[www.republika.com](http://www.republika.com)> diakses pada 1 Desember 2006

<sup>25</sup>Osman Raliby, *Ibnu Khaldun dan tentang Masyarakat dan Negara* (Jakarta : Bulan Bintang, cet. IV, 1978), hlm, 123

tentang pemikiran politik Sayid Abul A'lā Maududi, yaitu mengenai konsep pemerintahan Islam sebagai sistem politik pemerintahan di Negara Islam, baik dari segi latar belakang yang menjadi sebab timbulnya pemikiran tersebut, maupun usaha Maududi dalam merealisasikannya pada terciptanya Pakistan sebagai negara Islam.

Dalam mempelajari pemikiran politik Maududi tentunya diperlukan pendekatan guna menganalisa serta memetakan pemikirannya. Sesuai dengan penelitian ini yang difokuskan pada pemikiran politik Maududi maka sangat tepat jika digunakan pendekatan politik. Pendekatan ini akan sangat membantu penelitian dalam melihat segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, kondisi sosial muslim di India di bawah dominasi politik dan sosial kaum Hindu, menciptakan suasana yang tidak kooperatif dalam satu bangsa. Ketertindasan kian dialami muslim yang kemudian melatarbelakangi perjuangan para pemikir Islam di India dalam gerakan perubahan kehidupan sosial. Persamaan nasib dan religi mempengaruhi semangat tokoh-tokoh muslim di India untuk merubah situasi yang sedemikian sulit. Mereka menghimpun diri dalam pergerakan, berusaha menciptakan sebuah negara yang merdeka bagi Muslim di India. Salah satu figur kebangkitan Islam tersebut, adalah Maududi, yang mengedepankan aksi Islami guna mengakomodasi kepentingan dan melindungi umat Islam yang diwujudkan dalam negara Islam.

---

<sup>26</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : PT. Gramedia 19920, hlm. 16

Dalam mempelajari riwayat hidup, pemikiran maupun perjuangan Maududi dalam mengimplementasikan pemikirannya, akan dicapai hasil yang komprehensif jika menggunakan teori sejarah biografi yang dikemukakan oleh Wilhelm Dilthey. Teori ini sangat penting dalam mengungkap interaksi antara kedalaman insani dengan konstruksi universal dari kehidupan sejarah yang luas. Sebab dari interaksi akan menyebabkan adanya hubungan fundamental antara hidup dan sejarah.<sup>27</sup>

Teori di atas sejalan dengan penelitian ini yang berusaha mengungkap jati diri Maududi dan juga pemikirannya serta perjuangannya dalam mengimplementasikan pemikirannya pada negara merdeka bagi Muslim di India, yaitu Pakistan.

## **F. Metode Penelitian**

Kajian dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai studi sejarah. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah yaitu seperangkat asas atau kaidah yang sistematis untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber, menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis secara kritis mengenai rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Taufik Abdullah, *Manusia dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 5

<sup>28</sup> Gilbert J J. Garraghan, *A Guide To Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1984), hlm. 33. Bandingkan dengan Louis Gottschalk, *Understanding History*, pen. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.32. Lihat juga Hugiono dan P.K. Poerwanta, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.25.

Metode ini bertumpu dengan empat langkah kegiatan yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Keempat langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*Library Research*), maka dalam pengumpulan data (heuristik) dilakukan dengan bahan dokumen<sup>29</sup> melalui pencarian, buku-buku, jurnal, katalog di beberapa perpustakaan dan mencatat sumber-sumber terkait yang digunakan studi-studi sebelumnya.<sup>30</sup> Maka dari itu penulis berusaha mengumpulkan berbagai karya tulis, berupa buku-buku, jurnal, artikel, sumber lain yang relevan dengan objek dan pembahasan ini. Selain itu, untuk mendukung penelitian, data juga dikumpulkan dengan mengakses internet, berupa download data dari berbagai situs dan mailinglist, dengan demikian informasi sejarah mengenai Maududi akan lebih komprehensif.

#### 2. Verifikasi

Setelah penulis mendapat referensi atau pustaka yang sesuai dengan objek kajian, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah menguji keaslian (otentitas) dan keshahiannya (kredibilitasnya), melalui kritik intern dan ekstern sumber dengan menguraikan dan mengecek silang data-data yang ada dari berbagai sumber tersebut dan akan diambil data-data yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini langkah verifikasi sangat diperlukan, sebab seringkali penulis menemukan informasi yang berbeda antara satu pustaka dengan lainnya mengenai suatu informasi sejarah.

---

<sup>29</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 54

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng, 1997), 95.



### 3. Intrepretasi

Setelah data-data didapatkan dan dianalisis, maka penulis akan menemukan dan merumuskan beberapa konsep berkaitan dengan penulisan pemikiran politik Sayyid Abul A'lā Maududi, yaitu mengenai konsep kedaulatan Tuhan dalam sistem pemerintahan Islam, menjadi fakta sejarah yang dapat dinalisis, melalui pendekatan dan kerangka teoritik di atas. Pada tahap ini penulis telah melakukan penafsiran seobjektif mungkin dan kini telah disajikan dalam bentuk tulisan.

### 4. Historiografi

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dillakukan secara deskriptif-analisis dan berdasarkan sistematika yang telah direncanakan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menyusun laporan secara sistematis. Proses ini melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari penulisan kasar, kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing, dan atas koreksinya akan dilakukan perbaikan hingga nantinya diwujudkan sebagai skripsi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah, yang syarat akan ilmu pengetahuan, dengan demikian kebenaran karya ini menjadi hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kaidah atau ciri yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah karya ilmiah, adalah sistematis. Hal ini dimaksudkan, untuk memudahkan pembaca dalam memahami sebuah karya ilmu pengetahuan.

Ketentuan “sistematis”, juga berlaku bagi skripsi ini, berbagai pembahasan informasi sejarah yang berkaitan dengan judul, dikelompokkan dalam beberapa bab, yang masing-masingnya memiliki kajian yang berbeda, akan tetapi saling berkaitan.

Secara menyeluruh, hasil penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian secara umum.

Bab II membahas tentang gambaran kehidupan Maududi. Dalam Bab ini diuraikan latar belakang keluarga, pendidikan dan sosial budaya India yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian Maududi. Selain itu, berbagai karya yang dilahirkan dan latar belakang organisasi Maududi menjadi bahasan dalam bab ini. Adapun tujuan dari pembahasan bab ini adalah untuk mengetahui tentang jati diri Sayid Abul A’lā Maududi. Bahasan pada bab ini selanjutnya akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, sehingga dalam skripsi ini akan tampak memiliki alur yang jelas, yaitu pemikiran politik Maududi dan bagaimana usahanya dalam memberikan kontribusi terhadap negara Islam Pakistan.

Bab III membahas tentang pemikiran politik Sayid Abul A’lā Maududi. Pada bagian ini menguraikan pandangan Maududi terhadap paham ideologi politik Barat, yaitu demokrasi. Mengenai konsep negara Islam, pada bab ini akan diuraikan mengenai kedaulatan Tuhan sebagai sumber kekuasaan negara.

Perbedaan yang signifikan antara demokrasi dengan konsep negara Islam Maududi akan dikomparasikan dan juga membahas persamaan diantara keduanya.

Bab IV pada bab ini Maududi ditampilkan sebagai figur kebangkitan Islam dan berbagai cara yang ditempuhnya dalam “pembumian” pemikiran politiknya. Berkaitan dengan keberadaannya di dalam *Jama'at-e-Islāmi*, Maududi telah banyak melakukan hal besar, sebagai bentuk kontribusinya terhadap kemajuan organisasi. Selanjutnya, dengan membawa *Jema'at*, Maududi menjadi kelompok muslim fundamentalis dengan pemahaman ortodoks, mengusahakan terciptanya pemerintahan Islam dalam negara Pakistan, yang diwujudkan dengan konstitusi yang syarat nilai-nilai keagamaan. Pembahasan Maududi pada bab ini akan dirumuskan pada dua hal, yaitu peranan Maududi didalam *Jama'at-e-Islāmi* dan kontribusinya bagi konstitusi Negara Islam Pakistan.

Bab V merupakan bab yang terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini penting untuk dibicarakan karena merupakan inti dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan serta memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dalam pembatasan dan rumusan masalah pada bab I yang kemudian diuraikan pada bab-bab berikutnya, telah didapat jawaban-jawabannya, yaitu :

1. Sayid Abul A'la Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 M. (3 Rajab 1321 H) di Aurangabad India selatan, sekarang dikenal dengan Andra Pradesh. Peranan keluarga Maududi memberikan andil yang sangat besar, baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya dalam membentuk kepribadian Maududi yang setia terhadap Islam. Dari kedua orang tuanya Maududi mendapatkan pengetahuan agama, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap dirinya untuk menjadikan Islam sebagai *way of life*. Dengan semangat keagamaannya Maududi menulis berbagai karya yang bertujuan untuk menjelaskan keutamaan ajaran Islam, sehingga dapat diterima orang banyak sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Selain menuangkan pemikirannya dalam tulisan, Maududi berusaha memberikan kontribusi pemikirannya dalam bentuk nyata. Pada tanggal 26 September 1941 Maududi bersama dengan ulama lainnya mendirikan *Jama'at-e-Islāmi*. Organisasi inilah yang kemudian menngimplementasikan pemikiran Maududi, terutama berkaitan dengan keinginan muslim di India untuk hidup dalam negara Islam, yang kemudian terbentuk dengan nama Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947.

2. Ide-ide pembaharuan Maududi salah satunya mengenai keterkaitan antara agama (*dīn*) dan kekuasaan (*dawlah*) telah menempatkan Islam dalam ranah politik yaitu pada sistem pemerintahan negara Islam. Baginya Islam bukan hanya menempati kehidupan individu setiap manusia dalam rangka baktinya terhadap Tuhan, akan tetapi ajarannya yang menyeluruh juga membahas sistem politik yang ideal dan harus dijalankan. Keterkaitan antara ajaran Islam dan politik dalam pandangan Maududi, dirumuskan ke dalam satu istilah sistem politik pemerintahan yang bernama teodemokrasi. Sesuai dengan namanya, konsep ini mengakui sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Sehingga dalam Negara Islamnya, berbagai kebijakan atau peraturan dalam penyelenggaraan Negara haruslah didasarkan pada ajaran Tuhan. Ia menolak secara tegas demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama karena cenderung sekuler. Karenanya, Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat *syirik*. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta. Dengan demikian, dalam Negara Islam tidak dibenarkan adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, manusia sebagai pelaksana perintah Tuhan yang telah ditetapkan melalui al Qur'an, akan bertanggungjawab kepada Allah SWT. Meskipun ia anti barat dalam konsep negara Islamnya ia mempraktekkan trias politika, yang merupakan sebuah teori mengenai pembagian kekuasaan, yaitu

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Akan tetapi perbedaannya, ketiga lembaga ini merupakan perwujudan dari kekuasaan Tuhan. Baik secara *de Yure* maupun *de facto*. Legislatif, pada dasarnya merupakan lembaga konsultatif, yang disamakannya dengan *Majelis Syura*. Lembaga Eksekutif, dengan nama *Amīr* atau *Imām*, sedangkan lembaga Yudikatif, adalah *Qadhi*, atau lembaga kehakiman.

3. Lahirnya negara Islam dengan nama Pakistan, dalam pandangan Maududi, tidak hanya ditandai dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Akan tetapi pelaksanaan syari'at sebagai undang-undang, lebih menunjukkan bentuk negara yang khas Islam. Dengan kata lain Konstitusi negara haruslah berdasarkan pada al Qur'an dan as Sunnah. Konsep teodemokrasi yang digagas olehnya, dalam pandangannya sangat layak bagi sebuah tanah air muslim tersebut, bukan dengan mengadopsi sistem politik Barat meskipun sangat lazim dijalankan di berbagai negara. Untuk mencapai hal tersebut, Maududi memperjuangkannya melalui pergerakan *Jama'at-e-Islāmi*. Perjuangan Maududi dalam mengimplementasikan pemikirannya berhasil mencapai tataran praktisnya, sebagai bentuk kontribusi besarnya terhadap konstitusi Pakistan. Salah satu indikatornya adalah pada tanggal 7 Maret 1979 Majelis Konstituante menyetujui *Resolusi Objektif*, yang diajukan oleh *Jama'at-e-Islāmi* semasa itu jabatan amir dipegang oleh Maududi. Dalam resolusi tersebut pada intinya memproklamirkan Pakistan sebagai negara Islam.

## B. Saran-saran

Saran yang dapat diberikan untuk mempelajari biografi seseorang serta pemikirannya, yaitu :

### 1. Bagi Akademis

- a. Dengan adanya skripsi ini yang dilahirkan berdasarkan kajian literatur pada *library research* berusaha mendepkripsikan pemikiran politik Sayyid Abul A'la Maududi, secara objektif. Akan tetapi penulis sangat menyadari terdapat kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Dengan demikian *check and re check* sebagai wujud evaluasi. Sehingga kekeliruan dalam karya ini dapat diminimalisir.
- b. Untuk penelitian selanjutnya karya ini dapat dijadikan sebagai studi awal, dengan tetap memperhatikan berbagai referensi lainnya. Dengan demikian akan dilahirkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

### 2. Bagi Masyarakat Umum

Karya ini menghadirkan informasi sejarah mengenai tokoh Islam yang merupakan seorang pemikir, dan mujahid Islam. Dalam kehidupannya Maududi memberikan kontribusinya yang amat besar bagi kemajuan Islam. Namanya bergema di berbagai belahan dunia, khususnya di Pakistan setelah memisahkan diri dari India. Hal ini tentunya dapat menjadi stimulus bagi berbagai kalangan, terutama generasi muda Islam. Dengan mempelajarinya sifat kecintaan Maududi kepada Islam diharapkan akan mampu menggerakkan umat Islam untuk bersemangat dalam membela Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996
- Achmad Jainuri, “Pemikiran al-Maududi tentang Negara Islam”, dalam *Islam Berbagai Perspektif Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. DR.H. Munawwir Sjadzali, MA*. Cet. 1. Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Adams, Charles J., *Maududi dan Negara Islam Dalam Dinamika Kebangkitan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar, Jakarta : Rajawali, 1987.
- Aden Wiljdan SZ. Dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam* Yogyakarta : Safiria Insania Press bekerja sama dengan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, “PSI UII”, 2007
- Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Cet.3. Jakarta: LP3ES. 1996.
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Al-faruqi, Misbakh Islam, *Introducing Maududi*, Lahore: 1968
- Ali Anwar Yusuf, dkk., *Afeksi Islam : Menjeleajahi Nilai-Rasa Transedental bersama Al-Qur’an* (Bandung : Tafakur : Kelompok Humaniora, 2005
- Arfani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, Jakarta ; Gaya Media Pratama, 2001
- Asy Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, alih bahasa : Djamaludin, (Jakarta : Gema Insani Press
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mundar, *Kamus Arab Indonesia Al Asri*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, tt.
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qurán*, Bandung : Fa. Sumatra, 1976

- Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentaslisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta, 2000
- Brown, L. Carl, *Wajah Islam Politik*, terj. Abdullah Ali, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2000
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos, 1999
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah; Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*, alih bahasa, Asep Hidur, Cet. 1 Bandung: Pustaka, 1988.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini*, terj. Tim FORSTUDIA, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Esposito, John L., *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, penerjemah : A . Rahman Zainuddin, Cet. I Jakarta : Bulan Bintang, 1986
- \_\_\_\_\_, *Islam and Politics*, edisi II, New York, Syracuse University Press, 1987
- Fauzi Rahman, *Upaya Maududi Mendirikan Pemerintahan Islam*, Yogyakarta : Titian Press, 1995
- Garraghan, Gilbert J J. *A Guide To Historical Method*. New York: Fordham University Press. 1984
- Gottschalk, Louis. *Understanding History*. terj. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986
- Harun Nasution dkk (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : DEPAG, 1993
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980
- Hamka, "Orang-orang yang Saya Kenang", dalam *Panji Masyarakat*, No: 283, 15 Nopember 1979.
- Hawa, Said, *Al-Islam* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta : Gema Insani Press, 2004
- Hilmi, Mahmud. *Nizam al-Hukm al-Islami Muqaranan Bi an-Nuzumi al-Mu'asirah*. Cet.2. Dar al-Fikr al-'Arabi. 1973.

- Huffman, Murad W., *Islam in the Third Millenium, Bangkitnya Agama*, Jakarta : Serambi Ilmu, 2003
- Husain, Asaf, "Islam and Political of Pakistan", dalam *The Ceresent in The Easts Islam in Asia Mayor*, London : Cutzon Press, 1992
- Huwaitdy, Fahmi, *Al Qur'an dan Kekuasaan*, Cet. II, Solo : Pustaka Mantiq, 1982
- Iver, Mac, *Modern State* Jakarta : Aksara Baru, 1988
- Inu Lukman Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995
- Jamilah, Maryam, *Biografi Abul A'la Maududi*, Bandung: Risalah, 1984
- Judith N. Skhlar, *Montesquieu : Penggagas Trias Politica* Jakarta : Grafiti, 1996
- Karandikar, M.A., *Islam in India's Transition To Modernity*, Delhi : Orient Longmas, 1968.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* Yogyakarta: Bentang, 1997
- Kurdi, Abdurrahman Abdul Kadir, *Tatanan Sosial Islam : Studi Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah*, terj. Izzamuddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Lapidus, Ira., M. *A History of Islamic Societies*, Terj. Ghuftron A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian Ketiga, Cet. Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- M. Amin Rais,. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan. 1991.  
Rapar, J. H. *Filsafat Politik Plato*. cet.2 Jakarta: CV. Rajawali.1991
- M. Abdul Mujib, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- M. Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996
- M. Rifa'i Abduh, "Ulama Deoband dan Barelwi di India", No. 58, dalam *Jurnal al Jami'ah*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Mahmud Thahir, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam,. Impelementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. 1 Jakarta: UI Press, 1992

- Mahmud Ahmad Kamil Hasan Al-Manawi, *Eksikolpedi Al Qur'an Tematis*, Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2005
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Maududi, Abul A'la Al, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1984
- \_\_\_\_\_, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Dasar Sejarah pemerintahan Islam*, penerjemah : Muhammad al-Baqir. cet.4. Bandung: Mizan. 1993.
- \_\_\_\_\_, *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam*. terj. Moh. Nurkaim. Jakarta: Gema Insani Press. 1991
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Muhammad S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2002
- Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Matmer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Enna Hadi, dan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1984
- Mehdi, Rubiya, *The Islamization of The Law in Pakistan*, London : Press, 1994
- Miriam Budiadrjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet, XV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977
- Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta : IrciSoD, 2006
- Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan : Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, (Jakarta : Gramedia, 1993
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta : Raja Grafindo Utama Persada, 1996

- Muhhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1982
- Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan di Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.
- P.K Poerwanta, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara. 1987
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*, ter. Ahsin Mohammad, Bandung : Pustaka, 1982
- Rahnema, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.1995.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1992
- Rapar, J. H., *Filsafat Politik Plato*, cet.2 Jakarta: CV. Rajawali,1991.
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, cet. Keenam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Sadar, Zweddi, *Masa depan Islam*, Terj. Rahmani Astuti , Bandung : Pustaka, 1985
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung : CV. Armico, 1986
- Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi*, Yogyakarta : Pilar Media, 2004
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terj. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, Terj. Sidi Gazalba, dkk, Jakarta : Menko Kesejahteraan, 1966
- T.M. Hasbi Ashidiqueiy, *Al Islam*, Bagian II Jakarta : Bulan Bintang, 1977
- Taufik Abdullah, dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991.
- Taufik Adnan Amal, (ed.) *Neo Modernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1993

- Taufiq Muhammad Asy-Syawid, *Syura Bukan Demokrasi*, alih bahasa: Djamaludin Z. S. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Tim Penyusun, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Troll, Christian W., (ed.), *Islam in India: Studies and Commentaries*, Jilid I, Delhi : Vikas Publishing House, 1982
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, cet. Keenam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Voll, John Obert. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Pen. Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997.
- Watt, William Montgomery, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, terj. Noor Hadi. Yogyakarta: hafamira. 1996.
- \_\_\_\_\_, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Alih Bahasa: Helmi Ali dan Muntoha Azhari, Cet.I, Jakarta: P3M, 1988
- Widjajono Partowidagdo, *Memahami Analisis Kebijakan : Kasus Reformasi di Indonesia*, Bandung : Program Studi Pembangunan Program Pasca-Sarjana ITB, 1999.
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam Perbandingan antara Partai Masyumi ( Indonesia), dan Partai Jema'at Islami (Pakistan)*, Jakarta : Paramadina, 1999
- \_\_\_\_\_, *Maududi dan Jema'at Islami, Pembentukan dan Tujuan Politik Fundamentalisme dalam Jurnal Ulumul Qur'an No. 3 Tahun 1993*
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung : Mizan, 2002
- Zallum, Abdul Qadir, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil : Al Izzah, 2002

## B. Jurnal

- Sofwan Jannah, "Konsep Syura dalam Islam dan Pemerintahan Demokrasi Menurut UUD 1945 (Studi Perbandingan)." dalam *Jurnal Hukum Islam Al Mawarid*, Edisi 6, Yogyakarta : Fak. Syariah UII. Desember 1997.
- Sukron Kamil, *Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer* dalam *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.3 No. 1, September 2003.

Wirawan Hamir, “Ketegangan Politik Berkepenjangan di Pakistan”, dalam *Panji Masyarakat*, No. 637, 1-10 Febuari 1990

### C . Internet

“Abu A’la Maududi”, (2002), <[www.kotasantri.com](http://www.kotasantri.com)> Diakses pada 1 Desember 2006

Agung Primamorista, “Meluruskan Kerancuan Istilah Fundamentalisme Islam”, 1999, <[www.media.isnet.org](http://www.media.isnet.org)> diakses pada tanggal 1 Desember 2006.

Ahmad Sudirman, “Jaminan Keamanan dalam Khilafah Islam dengan Undang Undang Madinah-nya”, (2006), < <http://www.dataphone.se/~ahmad> > diakses pada 3 Maret 2007

“Akar Historis Negara Islam”, 2004, <[www.cmm.or.id](http://www.cmm.or.id)> diakses pada 1 Desember 2006

An Najm, “Krisis Umat Adalah Krisis Iman dan Akhlak”, 2002, <[www.sabah.gov](http://www.sabah.gov)> diakses pada 1 Desember 2006

Anis Ahmad, 2006, “Sayed Abul Ala Maududi”, <[www.icna.org/tm/greatmuslim](http://www.icna.org/tm/greatmuslim)> diakses pada 1 Desember 2006

“Apakah Sistem Demokrasi Haram”, <[www.syariahonline.com](http://www.syariahonline.com)> diakses pada 1 Desember 2006

“Borok Demokrasi”, (2005), <[www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id)> diakses pada 1 Desember 2006

“Cara-Cara Batil Menegakkan Daulah Islamiyah”, (2002) <[www.asysyariah.com](http://www.asysyariah.com)>

“Demokrasi: Antara Konsep Barat Dan Islam”, <<http://members.lycos.co.uk/nabirz/demokr.htm>> diakses pada 1 Desember 2006

“Demokrasi Versus Syura” dalam situs, (2005), <[www.google.com/demokrasiversussyura](http://www.google.com/demokrasiversussyura)>, diakses pada 1 Desember 2006

Denis Suito, “Akar Historis Negara Islam” <[www.cmm.or.id](http://www.cmm.or.id)>. Diakses pada 1 Desember 2006



“Ensiklopedia Gerakan Keagamaan”, < [www.al\\_ahkam.net](http://www.al_ahkam.net).> diakses pada 1 Desember 2006

Farhan Kurniawan, “Melacak Jejak-jejak Demokrasi Dalam Islam”, (2006) dalam situs <<http://filsafatkita.f2g.net>> diakses pada 20 Maret 2008

Hasan at-Turabi, 1999, “Kebangkitan Islam dan Negara-Negara Kawasan Arab”. <[www.isnet.com](http://www.isnet.com)>, diakses pada 1 Desember 2006

“Islam, Radikalisme, dan Demokrasi”, (2004), <<http://www.republika.co.id>> diakses pada 1 Desember 2006

“Jama'at Islami”, dalam situs <[www.al-ahkam.net](http://www.al-ahkam.net)> diakses pada 1 Desember 2006

“Jamaat-e-Islami”, 2006, <[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)> diakses pada tanggal 12 Maret 2007

M.I. Zahid, “The Finality of Prophethood”, <[www.irshad.org/finality.final.pro.php.htm](http://www.irshad.org/finality.final.pro.php.htm)>, diakses pada 12 April 2007

“Maulana Sayyid Abul A'la Maududi” <[www.witness-pioneer.org](http://www.witness-pioneer.org).> diakses tanggal 1 Desember 2006

Mustafa Haji Daud, “Pemikiran Politik Dan Ekonomi Al-Mauddud”, <[www.hasrizal.com](http://www.hasrizal.com)> diakses pada 1 Desember 2006.

Nerro, “Demokrasi Klasik vs Modern”, (2007) dalam situs <[www.forumsains.com](http://www.forumsains.com)> diakses pada 20 Maret 2008.

Pembicaraan Kekhalifahan”, (2006), <[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)> diakses pada 1 Desember 2006.

“Perbedaan Sistem Syura dan Sitem Demokrasi”, (2004), <[www.google.com/sistemsyurahtml](http://www.google.com/sistemsyurahtml)>, diakses pada 1 Desember 2006.

Rahimah, “ Pandangan Politik Maududi Tentang Negara Islam”, (2005), <[www.arabrahimah.com](http://www.arabrahimah.com)> diakses pada 1 Desember 2006

Saiful Daniel Mohd Yusof, “Abul A'la Maududi Pendiri Jamaat Islami Pakistan”, <[www.media.isnet.org](http://www.media.isnet.org)> diakses pada 1 Desember 2006

“Sayyid Abul Ala Maududi”, <[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)> diakses pada 1 Desember 2006

Shehzaad Nakhoda, "The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan", dalam situs <[www.google.com/constitution](http://www.google.com/constitution)> diakses pada 1 Desember 2007

"Surat Menyurat Maryam Jamilah – Maududi", <[www.media.isnet.org.htm](http://www.media.isnet.org.htm)> diakses pada 1 Desember 2006

"Tamaddun Islam" <[www.yahoo.com/tamaddunislam.html](http://www.yahoo.com/tamaddunislam.html)> diakses pada 3 Maret 2007.

Thohar, "Demokrasi Bukan Musyawarah", (2004), <<http://www.republika.co.id>> diakses pada 1 Desember 2006

Trax, "Who Was Abul Alaa Maududi", (2002), <[www.forumummah.com](http://www.forumummah.com)> diakses pada tanggal 1 Desember 2006

Witness-pioneer, 2004, "Maulana Sayyid Abul A'la Mawdudi", <[www.witness\\_pioner.org](http://www.witness_pioner.org)> diakses pada 1 Desember 2006

#### **D. Makalah**

Makalah, Irfan firdaus, "Bibliografi: Pengantar Diskusi ", disampaikan dalam Pelatihan HEFH2 (*Historical Education for Humanism Historian*), Patorono, Sabtu, 17 Februari 2007, pukul 13.00-14.30 WIB.

## Curriculum Vitae



Adiguna, dikalangan teman-temannya lebih sering disapa Adi, lahir di Tanjungpandan, pada tanggal 11 Maret 1982, yang merupakan anak ke dua dari empat bersaudara sekaligus anak laki-laki satu-satunya, dari orang tua Badrun Djaya, B.Sc. dan Rita Zaura. Ketiga saudaranya tersebut adalah Nurmalsari, Tri Lestari, dan Rizki Dwi Utami.

Adi, adalah mahasiswa Pendidikan Strata Satu (S1) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) angkatan 2001 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam perjuangan yang cukup melelahkan dalam menjalani rutinitas perkuliahan selama 6 tahun, yakni pada semester XII (dua belas) berhasil meraih gelar Sarjana Humaniora (S.Hum). Sedangkan, pendidikan Dasar 9 tahun ditempuh pada Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 13 Tanjungpandan, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Tanjungpandan, dan untuk sekolah lanjutan tingkat atas dilanjtkan di Madrasah 'Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpandan.

Semenjak menempuh pendidikan di SMP, pengalaman berorganisasi sudah dirasakan, seperti aktif di Gerakan Pramuka, dan olahraga Tae Kwon Do. Dari aktif di dua organisasi tersebut banyak pengalaman yang didapat, sebagai modal untuk mematangkan mental, serta berjiwa mandiri. Di bangku MAN, Gerakan Pramuka menjadi prioritas utama dalam organisasi, bahkan

pernah menjabat sebagai Ketua Ambalan. Olah raga Tae Kwon Do menjadi kegiatan yang rutin diikuti.

Ketika meninggalkan kampung halaman tercinta, yaitu pulau Belitung. Menuntut ilmu menjadi prioritas utama di tanah perantauan Yogyakarta. Meskipun tugas utama adalah belajar, berbagai keorganisasian menjadi motivasi dalam beraktivitas di dunia kampus. Ketika kuliah di Politeknik Pesantren Yayasan Darul Hikmah Indonesia (POLTEK YDHI) pada Jurusan Manajemen Informatika (MI), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) menjadi pilihan dalam berorganisasi,, bahkan sempat mendapat amanat sebagai Ketua pada periode 2001-2002. Merasa tidak cocok dengan jurusan yang dipilih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang merupakan salah satu jurusan di Fakultas Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga menjadi tempat menuntut ilmu selanjutnya. Beberapa organisasi yang pernah diikuti di Kampus UIN Sunan Kalijaga adalah Koordinator Departemen Pers dan Jurnalistik (DISPERJIL) Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) SKI, dan sempat bergabung di komunitas mahasiswa aktivis yang tergabung pada Komunitas Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), dan sempat menjadi kandidat Senat Mahasiswa Fakultas Adab (SEMA F), yang diusung oleh beberapa Partai Kampus. Akan tetapi sangat disayangkan sekali gagal duduk sebagai elit mahasiswa di SEMA F dikarenakan persamalahan politik partai Kampus, akhirnya pada tahun 2004 dengan segala pertimbangan memilih mengundurkan diri dari keorganisasian kampus, yang dinilai tidak *pure*, dan independen dari segala kepentingan elit kampus.

Pengalaman kuliah di UIN Sunan Kalijaga menjadi parsial dalam kehidupan Adi, berbagai ilmu yang didapat tidak akan terlupakan begitu saja, jasa dosen secara khusus dari sivitas Akademika tidak akan lekang oleh waktu yang hilang dari ingatan, dosen adalah orang tuaku kedua. Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga, akan selalu berada dalam ingatan, karenanyalah membuat diri beranjak lebih dewasa, memiliki kapabilitas, serta mampu bersaing dengan alumni Perguruan Tinggi lainnya. Terima kasih UIN Sunan Kalijaga,dan dosenku.